

ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DALAM MELAKUKAN ANEKSASI KRIMEA

2013-2018

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

Ari Nugroho Kartika Nasution

15323049

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DALAM MELAKUKAN ANEKSASI
KRIMEA 2013-2018**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Ari Nugroho Kartika Nasution

15323049

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DALAM MELAKUKAN ANEKSASI KRIMEA 2013-2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan

Internasional

Pada Tanggal

04 Mei 2021

Mengesahkan

Program studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua program studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St.,M.A)

DewanPenguji:

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP.,M.Sc.
2. Masitoh Nur Rohma,S.Hub.Int.,M.A.
3. Gustrieni Putri,S.IP.,M.A.

TandaTangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ari Nugroho Kartika Nasution

No. Mahasiswa : 15323049

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis kepentingan Rusia dalam menganeksasi Krimea tahun 2013-2018

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 April 2021



(Ari Nugroho Kartika Nasution)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin.

Tulisan penelitian ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas segala semangat, nasehat, dukungan, pengorbanan, dan doa yang tak terhingga, yang telah kalian hibahkan selama ini.

Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, nasehat yang telah diberikan selama ini.

Rekan-rekan HI UII

Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, perjuangan bersama selama menempuh kuliah di HI UII.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagipenulis
2. Kepada keluarga saya di rumah, yaitu ayah, ibu, dan adik saya. Mereka selalu memberikan dukungan penuh untuk saya. Mereka tanpa henti mengatakan jika saya harus lebih baik dan lebih kuat darisebelumnya.
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
4. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas IslamIndonesia.
5. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas IslamIndonesia.

6. Bapak Irawan Jati S.IP., M.Hum., M.S.S. Selaku dosen pembimbing saya yang pertama dan sangat sabar sekali dalam membimbing saya di bagian bab 1. Saya sangat bersyukur bisa dibimbing oleh bapak. Mohon maaf pak pada waktu itu saya sangat menyiakan waktu hingga kata-kata motivasi bapak sebelum bapak berangkat mengubah saya pak “siapa pun itu yang membimbingmu, kalau perubahan itu tidak datang dari dirimu, semua tidak akan berubah. hidup akan terus maju, kamu akan diam disitu”. Sehat dan sukses selalu pak. Hormat saya kepada bapak.
7. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, waktu serta pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini. Saya bersyukur mendapatkan Dosen Pembimbing yang sangat sabar membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu membimbing dan mau merelakan waktunya untuk terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga pak hadza selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah SWT.
8. *To the one and only* Ramadha Valentine, terkadang omonganmu itu pahit mad, apa lagi tindakanmu, tapi tanpa omongan dan tindakanmu skripsi ini tidak berjalan dengan baik, terima kasih atas ucapan dan tindakan yang pahit tapi banyak membantu. *You teach me to bow down to the process.*
9. Untuk tim sepik sepik santuy, beranggotakan Agus, Odong, dan Dede, kalian banyak ngebantu di pencapaian skripsi ini, terima kasih banyak dalam membantu pembuatan di skripsi ini dan menjadi pendengar yang baik. *My salute for you.*
10. Nanda Wijaya dan Jeffry Hariwijaya. Beda kampus, lulus duluan, pas nelpon selalu diingatkan soal skripsi tapi selalu konsisten support hingga akhir. *It is simple but meaningful*

ABSTRAK

Pada sejarahnya Krimea merupakan bagian dari Rusia, hingga tahun 1954, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev menyerahkan kembali Krimea kepada Ukraina. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev ingin menunjukkan persatuan dan kerja sama dengan Ukraina. Seiring berjalannya waktu Hubungan antara Ukraina dan Rusia mengalami dinamika tersendiri, mulai dari adanya perjanjian “*debt for fleet*” hingga adanya dugaan pasukan Rusia yang mendukung separatis pro Rusia yang dijuluki “*the little green man*”. Akhirnya Rusia menganeksasi Krimea dengan banyak membawa faktor sejarah, maka dari itu penulis akan meninjau mengapa Rusia menganeksasi Krimea dengan menggunakan konsep iredentisme yang memiliki indikator teritorial dan indikator politik dan etnis, beserta Eurasianisme yang akan mendukung dari faktor sejarah.

Kata kunci : Krimea, Rusia-Ukraina, Aneksasi, Iredentisme, Kepentingan nasional.

ABSTRACT

Historically Crimea was part of Russia, until 1954, Soviet Prime Minister Nikita Khrushchev handed back Crimea to Ukraine. This was because Soviet Prime Minister Nikita Khrushchev wanted to show unity and cooperation with Ukraine. Over time, the relationship between Ukraine and Russia experienced its own dynamics, from the existence of the "debt for fleet" agreement to the existence of Russian troops supporting pro-Russian separatists who were nicknamed "the little green man". Finally, Russia annexed Crimea with many historical factors, therefore the author will review why Russia annexed Crimea using the concept of irredentism which has several values like territorial indicators and political and ethnic indicators, along with Eurasianism that will support historical factors.

Keywords: *Crimea, Russia-Ukraine, Annexation, Irredentism, National interest.*

Daftar isi

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESALAN.....	iii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Signifikansi.....	4
E. Cakupan Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	5
G. Kerangka Konsep.....	10
H. Metode Penelitian.....	14
BAB 2	
KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP ANEKSASI KRIMEA.....	17
A. Dasar Historis Kebijakan Rusia kebijakan Rusia Dalam Isu Aneksasi Krimea.....	17
B. Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Krimea di Era Vladimir Putin.....	22
BAB 3 ANALISIS IREIDENTISME RUSIA TERHADAP ANEKSASI KRIMEA....	27
A. Indikator Teritorial.....	27
B. Eurasianisme.....	30
B.1 Gereja Ortodoks.....	32
B.2 Hegemoni Bahasa Rusia.....	33
B.3 Warisan Kekayaan Soviet.....	34
C. Indikator Politik Danetnis.....	35
BAB 4 KESIMPULAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

11 LATAR BELAKANG

Pada tahun 1783, Krimea mulai berada dibawah kuasa Kekaisaran Rusia. Secara geografis, Krimea memiliki posisi yang vital untuk melindungi Rusia dari Kekaisaran Ottoman. Fakta sejarah ini digunakan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai argumen utama ketika Rusia mengambil alih Krimea kembali pada tahun 2014. Selama ini, Rusia cenderung bisa bertahan dari infiltrasi militer asing berkat eksistensi AL Rusia yang memiliki pangkalan militer di wilayah Krimea yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam (Spencer, 2014). Secara historis, tepatnya pada tahun 1954, Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev menyerahkan kembali Krimea kepada Ukraina. Hal ini dikarenakan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev ingin menunjukkan persatuan dan kerja sama dengan Ukraina. Hal ini juga didorong oleh motif politik Khrushchev ingin memperkuat posisinya dalam perebutan kekuasaan yang muncul setelah kematian Stalin pada tahun 1953 (Popovici, 2018).

Pada tanggal 3 November 1990, sebuah komisi khusus dari pemerintah daerah Krimea mengumumkan adanya sebuah proyek untuk merumuskan keputusan sementara mengenai prosedur referendum di wilayah Krimea. Prosedur tersebut memungkinkan pemungutan suara untuk membangun kembali Krimea sebagai sebuah negara bagian Soviet yang berstatus otonom. Pemerintahan daerah Krimea mengadakan sesi khusus, di mana Presiden Kravchuk sebagai presiden dari Ukraina hadir dan mengumumkan bahwa dekrit Uni Soviet tanggal 30 Juni 1945 dan undang-undang *Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSSR)* tanggal 25 Juni 1946, berupa penghapusan *Autonomous Soviet Socialist Republic (ASSR)* Krimea. Hal tersebut dianggap sebagai tindakan melanggar hukum, dan penduduk Krimea memiliki hak untuk membentuk kembali ASSR Krimea sebagai subjek dari Uni Soviet dan anggota Perjanjian Uni.

Setelah berakhirnya Perang Dingin dan sebelum bubarnya Uni Soviet, pemerintah Krimea juga memutuskan untuk mengadakan referendum yang dijadwalkan pada 20 Januari 1991 untuk memutuskan status pemerintahan Krimea secara hukum. Menanggapi upaya referendum yang direncanakan oleh Mikhail Gorbachev, pada Januari 1991, sebelum perjanjian Alma-Ata, diadakannya Referendum Kedaulatan Krimea. Dalam referendum tersebut, pemilih ditanya apakah mereka ingin membangun kembali Republik Sosialis Soviet Otonomi Krimea yang telah dihapuskan pada tahun 1954. Namun, Kravchuk berkomitmen untuk mencegah Krimea untuk memisahkan diri dari Ukraina. Pada 12 Februari 1991, Presiden Kravchuk mengeluarkan undang-undang yang terdiri dari dua pasal. Pasal pertama menegaskan pendirian kembali Republik Sosialis Soviet Otonomi Krimea di wilayah *Crimean Oblast* dalam *Ukrainian Soviet Socialist Republic* (SSR). Pasal kedua menegaskan penunjukan pejabat untuk pemerintahan sementara Krimea ASSR. Akibatnya, Kravchuk mengabaikan hasil referendum dan menyatukan Krimea ke Ukraina. Hal ini tentunya bertentangan dengan kehendak penduduk Krimea (Burke, 2017).

Pada akhir 2013, Ukraina yang dipimpin oleh Presiden Viktor Yanukovych harus menghadapi krisis ekonomi sebagai akibat dari ekonomi dan adanya kondisi kekosongan pemerintahan yang membuat Viktor Yanukovych digulingkan. Viktor Yanukovych kemudian melarikan diri ke Rusia pada 2014 (Buchan, 2017). Presiden Yanukovych dituduh korupsi dan dianggap tidak mampu memimpin Ukraina. Kepergian Presiden Viktor Yanukovych ke Rusia dan adanya kekosongan kekuasaan di Kiev menyebabkan gerakan separatis Pro Rusiamenguat di Kiev. Hal ini berdampak terhadap Krimea dengan munculnya gerakan separatis dan Rusia mulai membantu kelompok-kelompok separatis ini dengan peralatan militer dan kendaraan yang diduga dikirim dari armada Rusia di Laut Hitam (Buchan, 2017).

Adanya kondisi yang tidak pasti di Krimea membuat Parlemen Krimeamemutuskan bahwa referendum diadakan untuk memutuskan masa depan Krimea. Dalam referendum ini, mayoritas orang memilih untuk akses Krimea ke Rusia.

Meskipun referendum ini tidak diakui oleh komunitas internasional, Rusia bersikeras bahwa Presiden Viktor Yanukovych-lah yang meminta Pasukan Rusia untuk memasuki Krimea demi melindungi Rusia dari adanya kekacauan di Krimea (Buchan, 2017).

Ada dua contoh penggunaan kekerasan oleh Rusia di wilayah Krimea. Salah satu contoh ini berhubungan dengan penggunaan unit militer Rusia yang dikerahkan di Krimea dan di kota Sevastopol di bawah perjanjian yang dibentuk pada tahun 1997 antara Rusia dan Ukraina. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menghasilkan serangkaian perjanjian yang berkaitan dengan Armada Laut Hitam dan penyebaran bagian Rusia (82%) di Krimea dan di kota Sevastopol. Perjanjian tersebut menentukan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia diizinkan untuk tinggal di wilayah Ukraina dan jumlah maksimum tentara, teknik militer, dan instalasi militer bisa mereka miliki sana. Contoh lainnya adalah berkaitan dengan kehadiran separatis pro-Rusia yang berasal dari militer Rusia yang sedang menyamar. Keduanya contoh ini dapat menjadi acuan untuk menganalisis motif aneksasi Rusia terhadap Krimea (Bilkova, 2015).

Di sisi lain, tindakan Rusia untuk menganeksasi Krimea sedikit kontroversial dan mengejutkan. Pada aksi militer Rusia di Kosovo dan Georgia yang diklaim didukung oleh Presiden Vladimir Putin juga menegaskan bahwa Krimea harus menjadi milik Rusia karena terdapat fakta sejarah. Krisis Krimea memberi banyak keuntungan bagi Rusia tidak hanya secara geopolitik, tetapi juga Rusia dapat memperluas wilayah mereka secara militer, dimana krisis tersebut telah menghentikan ekspansi NATO ke Ukraina dan juga membantu menjaga pangkalan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol (Treisman, 2016).

I2 RUMUSAN MASALAH

Dilihat dari latar belakang mengenai aneksasi Rusia terhadap Krimea maka ada rumusan masalah yang dapat ditanyakan :

Mengapa Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea tahun 2013-2018?

I3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk menganalisis aneksasi Rusia ke Krimea
2. Untuk menganalisis posisi Krimea terhadap wilayah Rusia
3. Untuk menganalisis aspek militer dari aneksasi Krimea
4. Untuk menganalisis aspek upaya-upaya Rusia dalam aneksasi Krimea

I4 SIGNIFIKANSI

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana analisis *irredentism* Rusia dalam melakukan aneksasi ke Krimea. Meskipun studi-studi yang menganalisa aneksasi sudah ada, namun studi-studi tersebut hanya menganalisis aneksasi menggunakan sudut pandang ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sehingga, riset ini lebih berfokus pada aspek keamanan dan aspek hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina yang kemudian mempengaruhi aneksasi tersebut. Hal ini penting karena Rusia mengincar Laut Hitam untuk mendorong perekonomian dan ekspansi militernya. Aspek keamanan juga belum banyak dibahas di penelitian yang sudah ada. Penelitian ini signifikan karena kebanyakan analisis yang hanya dipakai tidak hanya ekonomi tapi juga geopolitik dan *irredentisme*.

I5 CAKUPAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari lingkup kajian Studi Keamanan dan Politik Pemerintahan Eropa. Adapun skop penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini berfokus pada kebijakan Rusia mengenai Krimea pada tahun 2013-2018 dikarenakan pada tahun ini Rusia sangat gencar untuk melakukan aneksasi terhadap Krimea dan analisis Iredentisme Rusia dalam melakukan aneksasi ke Krimea. Meskipun begitu, analisis ini juga akan melibatkan penjelasan beberapa peristiwa sejarah yang elaboratif. Hal ini karena penjelasan tersebut dibutuhkan untuk memahami alasan iredentisme Rusia di Krimea. Penelitian ini juga membahas aneksasi Krimea karena isu ini merupakan isu yang marak diperbincangkan dalam studi hubungan internasional.

Selain dari itu, faktor Geopolitik juga bermain dalam aneksasi Krimea. Hal ini yang membuat penulis nantinya akan melihat bagaimana pergerakan Geopolitik Rusia terutama dengan adanya peninggalan masa Soviet di Krimea dan kultur bahasa yang didominasi oleh bahasa Rusia.

I6 TINJAUAN PUSTAKA

Sejak musim semi 2014, aksi yang dilakukan Rusia di Ukraina bagian timur serta di semenanjung Krimea Sebenarnya merupakan tindakan yang bersifat sepihak dan tidak sah (Engelberg, 2016). Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Rusia tidak akan melakukan tindakan sepihak dan tidak sah dalam menyelesaikan masalah (Putin, 2007). Rusia telah mengubah Ukraina bagian timur menjadi zona yang bermasalah, dimana

permasalahan tersebut terjadi di sekitar area Donetsk dan Luhansk dan Semenanjung Krimea di Laut Hitam. Demikian cara Rusia mulai menciptakan sebuah krisis yang disebut sebagai Krisis Ukraina (Ehrhart, 2014). Eskalasi tindakan Rusia yang seringkali dikategorikan sebagai perang hibrida (*hybrid warfare*). Perang hibrida merupakan penggabungan pendekatan militer dan nonmiliter, seperti perang konvensional berupa penggunaan senjata yang digabungkan dengan perang non-konvensional seperti embargo (Klein, 2015). Untuk itu, Rusia mengirimkan pasukannya yang menyamar sebagai gerakan separatis (Mackow, 2015). "Gerakan separatis" yang dilakukan Ukraina bagian timur ini mendapat dukungan dari Rusia. Dimana pasukan 'separatis' tersebut mengandalkan pasokan yang telah diberikan Rusia yang merupakan senjata berat seperti tank, pengangkut personal lapis baja, artileri, dan sistem anti pesawat udara, termasuk sistem rudal *surface-to air* yang menembak jatuh Malaysia Airlines pada penerbangan tanggal 17 Juli 2014 (Czuperski, 2015). Di sana, "konflik politik" kemudian berkembang menjadi "konflik perang terbuka". Aneksasi Krimea ke wilayah Rusia akhirnya berhasil melalui penggunaan tentara Rusia (Mackow, 2015).

Setelah referendum mengenai Krimea, Putin mengatakan dalam pidatonya bagaimana pentingnya pelabuhan Sevastopol terhadap Rusia. Putin menegaskan status Sevastopol sebagai tempat lahir dan pangkalan utama bagi Armada Laut Hitam Rusia (*Chernomorsky Flot*) (Putin, 2014). Pelabuhan Sevastopol yang letaknya berada di selatan Ukraina adalah kota militer dan ekonomi untuk kekuatan Rusia. Sevastopol memberikan Rusia akses bebas ke pelabuhannya

sepanjang tahun tanpa perlu terhalang lautan beku pada masa musim dingin sarana maritim juga aset militer serta akses perdagangan ke wilayah Balkan, Mediterania dan Timur Tengah (Cross, 2017). Hal-hal inilah yang mendorong Putin untuk menganeksasi Krimea (Putin, 2014).

Analisis mengenai kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina dapat dilihat dari beberapa perspektif. Di tingkat internasional, Rusia telah diasingkan dalam sistem Barat yang memicu Rusia untuk membedakan dirinya dengan Barat, sehingga Rusia memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan. Amerika Serikat perlahan-lahan mengalami penurunan status sebagai hegemon karena gagal menghadapi banyak krisis internasional sebagai akibat dari perengangan kekuasaan yang berlebihan. Rusia, di sisi lain, memiliki waktu optimal dalam menggunakan kemampuan hegemon regionalnya di Krimea tanpa ditantang secara efektif. Pentingnya dinamika domestik dalam kebijakan Ukraina menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara yang memberikan perhatian besar pada politik negara-negara sebelumnya sebagai tetangga dekat dan kelanjutan hubungan mereka dengan Rusia.

Adanya Kerjasama ekonomi Rusia-Ukraina dan kesetaraan dalam hubungan kedua negara tersebut. Dalam hubungan tersebut Rusia memiliki pengaruh yang cukup besar, walaupun kecenderungan Ukraina terhadap Uni Eropa tidak dapat diabaikan. Rusia menganggap bahwa Ukraina berada di bawah sayapnya dan Rusia juga mengklaim untuk bertanggung jawab atas penduduk Ukraina yang berbahasa Rusia. Pada akhirnya secara individu dapat di garis bawahi bahwa adanya sifat otoriter di dalam Vladimir Putin dalam membuat

sebuah keputusan kebijakan luar negeri dan kepekaan pribadinya terhadap wilayah bekas Uni Soviet. Singkatnya, aneksasi Krimea telah terjadi sebagai akibat dari tekanan eksternal, berkurangnya otoritas hegemon dan sekutunya, kepercayaan ekonomi yang berlebihan, budaya nasionalistik termasuk upaya untuk melindungi etnis Rusia yang berada di dalam Ukraina (Yamanlar,2014).

Krisis yang terjadi di Ukraina melekat dalam diri Ukraina dan Rusia, dimana adanya krisis ini pada akhirnya telah membagi Ukraina dalam beberapa bagian menurut etnis dan politiknya. Bagian Barat dan Tengah sebagaimana wilayah tersebut cenderung pro-barat sedangkan bagian Timur dan Selatan lebih condong ke Rusia. Penyebab adanya krisis ini adalah keputusan yang terjadi pada November 2013, dimana Presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych membatalkan penandatanganan perjanjian Uni Eropa alih-alih ia memberi syarat akan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Dengan sangat cepat, hal ini berubah menjadi demonstrasi sehingga muncullah perjanjian 21 Februari untuk mengakhiri demonstrasi tersebut. Namun selanjutnya Yanukovych melarikan diri dan mundur dari pemerintahan Ukraina. Di Krimea, dimana populasi mayoritasnya berasal dari etnis Rusia, maka segala hal yang terjadi di Ukraina dianggap ilegal dan anti-Rusia (Ambrosio, 2016).

Hukum internasional melarang pelanggaran integritas wilayah negara lain. Dalam hal Ukraina khususnya, Rusia secara hukum terikat oleh dua dokumen penghormatan integritas wilayah Ukraina yaitu Memorandum Budapest 1994 dan Perjanjian 1997 tentang Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan antara Ukraina dan Rusia. Oleh karena itu, bagian penting dari pernyataan Perdana Menteri Rusia

adalah untuk membela diri terhadap tuduhan bahwa Rusia telah melanggar hukum internasional dan hukum bilateral. Tentunya Rusia memiliki alasan yang kuat atas pernyataannya tersebut. *Pertama*, mereka melakukan serangan dan mengkritik penggulingan Yanukovych dan pemerintahan baru yang ada dimana keduanya telah menjadi alasan dasar bagi Krimea untuk meninggalkan Ukraina. *Kedua*, mereka membuat argumen hukum bahwa Krimea memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum internasional yang ada. *Ketiga*, penggabungan semenanjung ke dalam Federasi Rusia bukanlah aneksasi, karena Krimea sudah menjadi negara merdeka meskipun dalam waktu yang singkat (Ambrosio, 2016).

Dalam sebuah jurnal berjudul “*The rhetoric of irredentism: The Russian Federation’s perception management campaign and the annexation of Crimea*” yang ditulis oleh Thomas Ambrosio, kasus aneksasi Krimea tersebut dianalisis dengan melibatkan banyak pihak seperti NATO dan Amerika, berbeda dengan skripsi ini kasus aneksasi tersebut dianalisis dengan menggunakan konsep irredentisme dan hanya menyinggung antara Rusia, Ukraina, dan Krimea tanpa adanya menyinggung pihak lain.

Irredentisme Rusia seringkali dikaitkan dengan aneksasi Rusia ke Krimea. Hal ini dilakukan oleh Rusia untuk mengambil kembali wilayah dari kerajaan Rusia ataupun pada zaman USSR. Pada Skripsi ini, dengan menggunakan teori *Irredentism*, penulis akan melihat kenapa Rusia melakukan aneksasinya terhadap Krimea, yang banyak ditentang oleh negara lain.

Pada skripsi ini juga penulis akan melihat permainan geopolitik Rusia untuk melihat bagaimana Rusia menggunakan Aneksasi ini untuk menyebarkan

Hegemoninya. Di sisi lain, Penulis akan melihat bagaimana Rusia memanfaatkan aspek Budaya dan peninggalan Uni Soviet sebagai dasar Rusia untuk menganeksasi Krimea.

Nantinya, yang membedakan skripsi ini dengan beberapa penelitian yang sudah ada adalah pada skripsi ini penulis hanya melihat melalui hubungan antara Rusia dan Ukraina terhadap Krimea. Pada skripsi ini aneksasi Krimea yang diambil antar tahun 2013-2018, tetapi nantinya penulis banyak membahas sejarah antara kedua negara tersebut untuk dapat menganalisis kepentingan rusia dalam melakukan aneksasinya di karenakan salah satu alasan Rusia menganeksasi Krimea adalah melalui faktor sejarahnya, hal ini sejalan dengan konsep iredentisme yang digunakan dan dibantu juga dengan Eurasianisme.

I.7 KERANGKA KONSEP

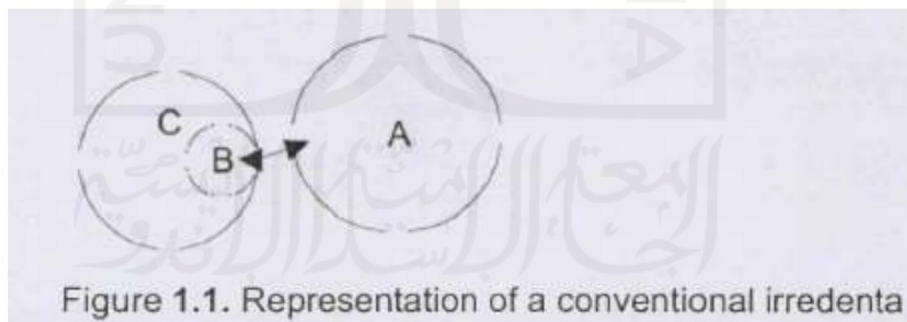
Iredentisme

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Iredentisme dari Fuzesi. Konsep Iredentisme adalah kebijakan negara yang bertujuan untuk menganeksasi wilayah yang berdampingan dan etnis yang tinggal di negara-negara tetangga. Sebagai dinamika politik, konsep tersebut terletak di persimpangan antara politik dalam negeri dan politik antar negara, dengan baik menangkap kaburnya batas-batas antara keduanya di dunia kontemporer. Ada dua faktor pembeda yang membedakan konflik yang irredentist dan yang bukan : 1) peran negara (berlawanan dengan aktor non-negara seperti organisasi *irredentist* dan 2) keberadaan kebijakan yang secara eksplisit ditujukan untuk (kembali) mendapatkan kembalikan kontrol teritoridanrakyatyangdiklaimolehnegara

sebagai miliknya (sebagai lawan dari orientasi dan sentimen yang lebih kabur, atau bahkan klaim yang mungkin atau mungkin tidak dikenai sanksi oleh negara) (Fumagalli, 2010).

Ada dua jenis cara untuk mengetahui konsep *irredentism*. Pertama, jika diibaratkan seperti lingkaran, terdapat tiga lingkaran, dimana lingkaran A (Rusia) merupakan negara *parent state*, dan lingkaran C (Ukraina) yang merupakan *neighbouring host state*, dan lingkaran B (Krimea) yang terletak didalam lingkaran C merupakan *transborder ethnic brethren*. Lingkaran B dan lingkaran A memiliki kesamaan etnik dan budaya, tetapi dalam situasi ini lingkaran B terdapat didalam lingkaran C, namun lingkaran A dapat memasuki lingkaran B dan sebaliknya, pergerakan inilah yang disebut *irredentism*, dimana pergerakan ini bertujuan untuk menyatukan wilayah dan penduduknya untuk kembali melakukan kerjasama antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 1 : Penjelasan konsep irredentisme pertama

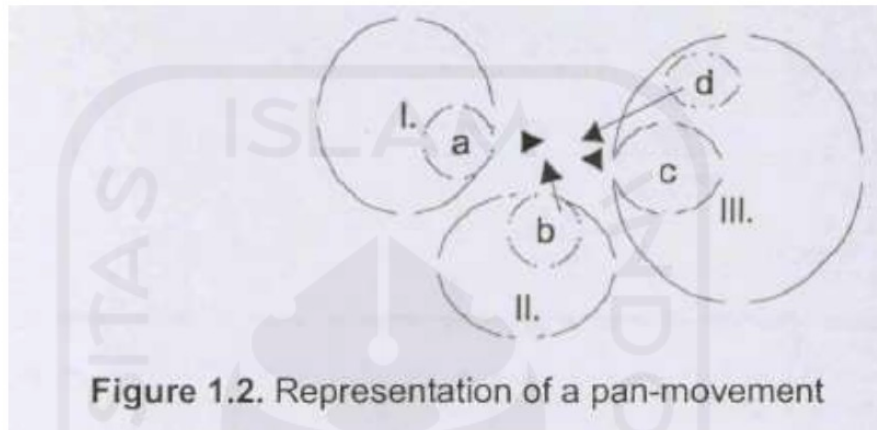


Sumber : (Fuzesi, 2014)

Kedua, jika diibaratkan seperti lingkaran, terdapat empat lingkaran, dimana lingkaran A, B, C, D merupakan kelompok etnik yang tersebar di beberapa negara asalnya, dimana C dan D negara asalnya sama, karenakurangnya

pengawasan dari negara asal mereka mencoba membangun wilayah sendiri dengan menyatukan etnik dari beberapa negara asal. Yang paling umum melibatkan etnis kelompok yang merupakan mayoritas dalam negara yang membuat klaim *irredentism* dan minoritas di negara tetangga (Fuzesi,2014)

Tabel 2 : Penjelasan konsep irredentisme kedua



Sumber : (Fuzesi, 2014)

Ada beberapa indikator, untuk menganggap tindakan negara tersebut dapat disebut Irredentisme (Fuzesi, 2014) :

1. Teritorial

Fokusnya di sini adalah tentang persaingan kekuasaan, di mana adanya motif untuk melakukan ekspansi oleh *parent state*. Hal ini biasanya terjadi karena adanya faktor sejarah. Faktor sejarah ini menyangkut tentang bagaimana wilayah yang dulunya dimiliki suatu negara ingin diklaim kembali berdasarkan sejarah yang sudah terjadi dan faktor lain juga dikarenakan adanya keuntungan di suatu wilayah yang dapat memberikan manfaat bagi negara yang melakukan aneksasi.

I. Eurasianisme (Palat, 1993)

Eurasianisme berpendapat bahwa wilayah bekas Uni Soviet dan kekaisaran Rusia, memiliki keunikan tersendiri dalam hal peradaban. Oleh karena itu peradaban ini tidak boleh melakukan sebuah kesalahan besar dalam upaya untuk berintegrasi dengan Eropa (atau dengan peradaban lain), mencoba meniru perkembangan Eropa, atau menyusun kembali kesadaran budayanya dalam kategori-kategori Eropa.

2. Politik dan Etnis

Indikator ini menjelaskan tentang iredentisme melalui gagasan politik, dan penjelasan ini melibatkan kecenderungan nasionalisme. Indikator dari ini adalah pengalaman masa lalu, upaya perubahan paham nasionalisme, simbol dan teritori. Dalam indikator ini negara melakukan aneksasi terhadap negara lain untuk menyebarkan *hegemony*-nya terhadap pihak tertentu.

Dalam indikator politik ini juga, Penulis akan melihat bagaimana Rusia bermain dalam kebijakan luar negerinya baik secara militer dan penyebaran hegemoni secara politik, sehingga nantinya kita dapat melihat bagaimana Rusia berusaha mengambil kembali Krimea dengan menggunakan hegemoni politiknya.

Berbeda dengan indikator politik, etnis biasanya akan membawa unsur *ethno-nationalism* dengan menghadirkan rasa emosional dan membawa pengaruh psikologis dengan menunjukkan adanya ikatan antar etnis atau

adanya persamaan etnis sebagai faktor utama. Dalam hal ini biasanya negara yang akan menganeksasi menggunakan etnis lokal sebagai basis untuk melakukan aneksasinya.

Secara umum, kita ketahui bahwa Krimea sudah menjadi bagian dari Ukraina, tetapi Rusia beranggapan bahwa Krimea itu berada pada bagian kedaulatannya, sehingga Rusia melakukan aneksasi ke Krimea, maka dari itu di dalam skripsi ini konsep Iredentisme yang digunakan untuk meneliti kasus tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan konsep yang pertama di mana adanya *parent state* yang melakukan pergerakan ke arah suatu daerah yang memiliki kesamaan etnik dan budaya dan bertujuan untuk menyatukan wilayah dan penduduknya untuk kembali melakukan kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Nantinya, konsep iredentisme ini akan didukung juga dengan 2 indikator yaitu indikator teritorial dan indikator politik dan etnis, selain itu ada juga dengan konsep iredentisme yang kedua, yang sejalan dengan Eurasianisme yang memberikan pandangan pada unsur budaya, sejarah dan geografis yang terangkum dalam konsep tersebut untuk menjawab mengapa Rusia melakukan aneksasi ke Krimea.

18 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan studi pustaka sesuai dengan topik yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana kebijakan Rusia

terhadap Krimea, serta beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Rusia atau yang akan dilakukan Rusia. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang luas yang meliputi berbagai metode penelitian. Penelitian kualitatif membutuhkan pengumpulan informasi yang sistematis, informasi yang tekstual seperti gambar, wawancara, video, dan juga biasanya penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis (Young & Hren, 2017).

2. Subjek dan objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah Rusia dan Ukraina sebagai negara yang sedang mengalami isu tersebut. Kedua negara ini nantinya akan dicari aspek apa saja yang menjadi penyebab dari isu tersebut, dan yang menjadi objeknya di sini adalah Krimea karena wilayah ini yang menjadi perebutan antara dua negara tersebut.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dengan mengambil dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan mengkritisinya dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah buku-buku rujukan terhadap Kebijakan Rusia terhadap Ukraina secara umum, lalu mengarah kepada kasus Krimea, dan sejarah terhadap posisi Rusia kepada Krimea, lalu buku yang menjelaskan terkait teori *irredentism*.

4. Proses Penelitian

Hal pertama yang dilakukan yakni mengumpulkan data-data terkait topik penelitian, hingga didapatkan informasi yang sesuai dan detail dengan materi

yang telah ditentukan. Setelah melakukan proses pengambilan data, yang kedua data akan dianalisis dengan membaca dan memahami ide umum. Lalu yang ketiga dilanjutkan dengan mengkategorisasi hasil menjadi beberapa sub bab (tergantung dari pembahasan apa saja yang ingin dicantumkan). Setelah melakukan pengkategorisasian melalui pembagian sub bab, lalu yang keempat dilanjut dengan mengembangkannya dengan narasi atau deskriptif untuk menjabarkan pemahaman mengenai informasi tersebut. Tahap kelima mulai memasukkan unsur dengan kritik-kritik dan analisis melalui deskriptif dalam satu bab, bagian ini menjadi bagian yang dianggap mulai menjadi tahap dimana penulis mulai menemukan jawaban dari Rumusan Masalah.



BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP ANEKSASI KRIMEA

2.1 Dasar Historis Kebijakan Rusia kebijakan Rusia Dalam Isu Aneksasi Krimea

Hubungan Rusia dan Krimea banyak mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat dari garis historis hubungan bilateral keduanya. Rusia dan Krimea pernah mengalami peperangan yang menyebabkan hubungan keduanya dalam posisi yang buruk. Perang Krimea pada tahun 1853-1856 berawal dari ancaman Rusia terhadap berbagai kepentingan Eropa. Ancaman tersebut diberikan melalui Turki. Hal ini menimbang banyak investasi negara-negara Eropa pada wilayah negara Turki. Perang tersebut berawal dari tekanan Rusia terhadap Turki dan mengancam kepentingan Inggris dalam strategi dan komersial di Timur Tengah dan India. Ancaman ini kemudian mendorong negara Perancis yang melihat hal tersebut sebagai peluang untuk melakukan provokasi dengan menggunakan isu tersebut yang bertujuan untuk mempererat aliansi dengan Inggris dan memperkuat kembali kekuatan militernya (History,2018).

Pasukan Perancis dan Inggris memberikan perlindungan terhadap Istanbul sebelum mereka melakukan penyerangan terhadap Rusia melalui Laut Hitam, Baltik, Arktik, dan Pasifik, dibantu dengan melakukan blokade di daerah maritim. Pada September 1854, para sekutu telah datang di Krimea, mereka berencana untuk menyerang Sevastopol dan Armada Rusia dalam kurun waktu 6 minggu sebelum mereka kembali ke Turki. Setelah mereka berhasil menduduki posisi di

Sungai Alma, pasukan Perancis dan Inggris lengah hal ini memberikan kesempatan kepada Rusia untuk memperkuat militer mereka kembali dan menyerang sekutu di pertempuran Balaklava dan Inkerman. Setelah pertempuran terjadi, para pasukan sekutu berhasil memotong logistik Rusia dengan cara mengambil alih Laut Azov, kemudian, dengan bertambahnya logistik berbasis laut, para pasukan sekutu lebih unggul dibandingkan dengan Rusia dan berhasil mendorong Rusia keluar dari Sevastopol, yakni pada saat 8-9 September 1855 (History,2018).

Pada tahun 1856, Rusia telah mendeklarasikan kekalahan dalam Perang Krimea. Hal ini juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian Paris terkait kekealahannya tersebut. Akibat dari perang yang dilakukan Rusia di Krimea, dari segi militer dan ekonomi negara Rusia mengalami banyak tekanan yang menyebabkan kondisi kian memburuk. Sehingga hal ini juga mendorong Rusia yang pada saat itu sepakat untuk mengambil kembali pangkalan angkatan lautnya di pelabuhan Sevastopol. Perjanjian ini juga merupakan bagian dari persyaratan yang diajukan oleh Inggris, Prancis dan sekutu mereka. Inggris dan sekutu melihat Rusia sebagai suatu ancaman akibat militernya yang menduduki wilayah pelabuhan Sevastopol. Sehingga hal ini juga mendorong pihak Inggris dan sekutunya menginisiasi untuk menghilangkan Rusia di wilayah Laut Hitam (History,2018).

Selama ratusan tahun, Krimea sudah menjadi tempat tinggal etnis Tatar. Etnis Tatar adalah kelompok yang berbahasa Turki. Mereka mulai menempati daerah Krimea pada saat Kekaisaran Ottoman hingga saat Tsarina Katarina

Agung menganeksasi Krimea. Krimea telah memberikan keuntungan besar bagi para pemimpin Rusia sejak Tsarina Katarina Agung melakukan aneksasi terhadap Krimea pada 1783. Tahun 1944, sekitar 200.000 etnis Tatar dipindahkan oleh Stalin ke Siberia dan Asia Tengah. Stalin juga membawa etnis Rusia ke Krimea untuk menguasai ranah perburuhan. disinilah dimulainya penyebaran etnis Rusia di Krimea, sehingga banyak etnis Rusia yang tinggal di Krimea (History,2018).

Setelah Stalin meninggal, perdana menteri Soviet Nikita Khrushchev memindahkan Krimea ke Ukraina untuk menunjukkan sebuah tindakan yang disebut sebagai "*noble act on behalf of the Russian people.*" Pemandahan tersebut dipuji pada saat pertemuan badan legislatif tertinggi Uni Soviet yaitu *Presidium of the USSR Soviet Supreme* 1954. Krimea yang terletak cukup strategis apabila ditinjau dari wilayahnya, negara Krimea sebenarnya merupakan bagian dari Ukraina. Krimea juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap militer Rusia. Dengan adanya wilayah Krimea menjadi bagian dari Rusia, maka hal ini cukup mendorong perluasan wilayah pertahanan militer Rusia terutama ekspansi pada wilayah Laut Hitam. Bukan hanya di Laut Hitam, tetapi pertahanan militer tersebut juga merambah wilayah Mediterania. Setelah runtuhnya Uni Soviet, perjanjian Rusia dengan Ukraina pada tahun 1997 mengizinkan Rusia untuk menjaga Armada Laut Hitamnya di Sevastopol, berdasarkan kontrak yang sudah diperpanjang hingga 2042 (Popovici, 2018).

Pada abad ke-19, ekspansi imperialisme adalah strategi Rusia untuk mempertahankan negaranya dari penjajahan. Rusia percaya bahwa jika mereka tidak memperbesar kerajaannya maka logikanya negara lain yang akan

melakukannya ekspansi tersebut. Berbeda dengan kekaisaran yang ada di Eropa, Rusia tidak terlalu mengambil kesempatan untuk membentuk Afrika, Amerika, Timur Tengah, atau Asia, melainkan Rusia berkembang dengan cara memasukkan wilayah tetangga. Ekspansi kekaisaran Rusia sangat energik selama bertahun-tahun hingga yang terakhir adalah perang Napoleon. Ekspansi Rusia yang terjadi semasa Perang melawan Napoleon ini yang membuat Rusia menganeksasi wilayah yang sekarang menjadi Ukraina, Finlandia, Belarus, Polandia, dan Lithuania, serta wilayah di sepanjang Laut Hitam. Tidak seperti Jerman atau Prancis, Rusia tidak pernah mengancam untuk mengambil alih negara-negara besar Eropa lainnya, meskipun hal ini membuat negara bagian yang kecil lebih berisiko. Namun selama sejarahnya, Rusia sering mendapatkan konflik dengan negara-negara besar Eropa, atau pengelompokan mereka, atas kebijakannya di Eropa Tengah dan Timur, terutama Balkan (misalnya, Perang Krimea, Perjanjian San Stefano, dukungan untuk pan-Slavisme sebelum Perang Dunia Pertama) (Bebler,2015).

Dalam pandangan hukum, aneksasi Rusia terhadap Krimea pada tanggal 18 Maret 2014 juga telah melanggar wilayah dan kedaulatan Ukraina. Rusia jugatelah melanggar hukum internasional serta perjanjian yang telah ditandatangani oleh Rusia dalam kemitraan dan kepercayaan dengan negara-negara Eropa lainnya. Beberapa pidato dan komentar presiden Rusia yang berhubungan dengan konflik Ukraina telah menuai banyak kritik dan penolakan kuat terhadap tatanan internasional Barat dan praktik politik. Karena pendekatan politik yang berbeda dan bahkan tidak kompatibel, kebijakan luar negeri Rusia yang agresif terhadap

Krimea telah memicu dilema serius dan perdebatan sengit di antara negara-negara Barat mengenai tujuan akhir politik identitas Rusia dan kebijakan luar negerinya dalam konflik ini (Bebler, 2015).

Pada tahun 2004, Presiden Ukraina Leonid Kuchma mempunyai hubungan yang sangat erat dan loyal dengan Rusia. Adanya hubungan yang erat ini membuat pemerintah Ukraina dapat membeli gas dengan harga stabil yaitu \$ 50 per 1.000 m³, harga tersebut jauh di bawah harga pasar umum Eropa. Melalui rasa keistimewaan, Ukraina menyetujui kesepakatan "*debt-for-fleet*" dengan Rusia. Dalam konteks *debt-for-fleet* ini, Rusia mendapatkan akses ke Pangkalan Armada Laut Hitam Sevastopol di Krimea. Rusia memutuskan agar hutang gas Ukraina sebesar \$ 700 juta dibatalkan. Aneksasi terhadap Krimea memberikan Rusia kemenangan terhadap apa yang dibutuhkannya untuk melanjutkan manipulasi politiknya terhadap Ukraina. Dengan mengkonstruksi invasi terhadap Krimea sebagai bentuk keselamatan, Rusia berusaha untuk menginternasionalisasikan ajaran Soviet tentang kejutan militer (Grashkin, 2019).

Kehadiran angkatan khusus militer Rusia di Krimea, yang disebut sebagai "*little green man*," memberikan peluang untuk diadakannya referendum ilegal, dan dapat mendorong penguasa Donetsk dan Luhansk yang kebetulan merupakan pendukung Pro-Rusia dan Rusia bisa memanfaatkan peluang ini dikarenakan adanya kekosongan politik yang diciptakan oleh kelumpuhan yang berasal dari pemerintahan di Kiev dan mendeklarasikan kota mereka sebagai sebuah negara yaitu *Donetsk People's Republics* (DNR) and *Luhansk People's Republic* (LNR) (Grashkin, 2019).

Sejak 2014, kedua wilayah tersebut telah mengadopsi beberapa poin dari negara *de facto* seperti membentuk ulang sistem peradilan, membentuk konstitusi mereka sendiri, dan membuat bendera dan simbol negara mereka sendiri. Tidak ada keinginan untuk mencari sebuah legitimasi dari lembaga-lembaga Barat. Sentimen anti-Barat yang dibentuk oleh pro-Rusia mendominasi sektor sosial-politik. Bukanlah sebuah kebetulan di mana pasukan Rusia, serta organisasi paramiliter seperti Grup Wagner, merupakan kunci untuk kelangsungan hidup DNR dan LNR yang di dukungan oleh Kremlin, milisi DNR / LNR telah direorganisasi oleh intelijen Rusia (Grashkin, 2019).

2.2 Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Krimea di Era Vladimir Putin

Pada dasarnya, politik luar negeri suatu negara mengacu pada kepentingan nasional dari negara tersebut, sama halnya dengan Rusia. Dalam hal ini politik luar negeri Rusia juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Rusia beserta hukum-hukum internasional yang berlaku secara umum. Selain itu, kebijakan yang dibentuk oleh Rusia tentunya juga dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan yang ada. Selanjutnya, kebijakan tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak eksekutif termasuk atas mandat dari Presiden Rusia. Otoritas tertinggi dalam membuat suatu kebijakan luar negeri dipegang oleh presiden. Kebijakan Rusia diperkuat dengan adanya dasar yang tertera dalam perintah eksekutif presiden Rusia No.605 pada tanggal 7 Mei 2012 yang berisi tentang langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakannya, strategi keamanan, doktrin

militer, dan undang-undang mengenai kegiatan kebijakan luar negeri otoritas daripemerintah (Union, 2016).

Politik luar negeri Rusia banyak didominasi oleh kebijakan dalam bidang militer. Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Hal ini yang mendorong Rusia banyak berperan aktif dalam isu keamanan internasional. Dalam hal ini, isu Krimea juga menjadi salah satu isu keamanan yang dihadapi oleh Rusia. Hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina banyak mengalami pasang surut. Puncaknya, dalam isu Krimea yang menjadi salah satu perdebatan terbesar yang menghancurkan hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina. Isu tersebut mendorong kedua negara untuk saling melakukan aksi militer. Kebijakan luar negeri Rusia dalam isu Krimea merupakan kepentingan yang menimbang dari berbagai aspek. Rusia meyakini bahwa Krimea merupakan bagian dari Rusia yang dibuktikan melalui beberapa faktor. Diantaranya dapat ditinjau dari segi historis seperti pada era Uni Soviet, Krimea sempat berada di dalam kekuasaan *Russian Soviet Federative Socialist Republic* (RSSR), serta pada politik dan etnis Krimea memiliki sistem pemerintahan yang masuk pada wilayah pemerintahan Rusia dan juga di dalam wilayah Krimea banyak terdapat etnis Rusia di dalamnya (Union, 2016).

Kebijakan Rusia terhadap Krimea diantaranya ada yang menggunakan kekuatan militer seperti yang dilaporkan oleh Federasi Rusia di wilayah Krimea. Berkaitan dengan penggunaan unit militer Rusia yang diarahkan di Krimea dan di kota Sevastopol pada perjanjian yang disimpulkan pada tahun 1997 antara Rusia dan Ukraina. Selain itu berhubungan dengan kehadiran milisi pro-Rusia lokal

yang merupakan prajurit Rusia yang beroperasi dalam seragam milisi lokal atau dalam seragam hijau yang tidak dapat dibedakan biasa disebut dengan *little green men*. Pada 1 Maret 2014, Dewan Federasi Rusia menerima permintaan dari Presiden Putin untuk penggunaan angkatan bersenjata Rusia di Ukraina “*until the normalization of the socio-political situation in this country*” (Russian Newspaper, 2014).

Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina membentuk beberapa perjanjian yang berhubungan dengan divisi Armada Laut Hitam dan penyebaran bagian Rusia (82%) di Krimea dan di Sevastopol. Perjanjian tersebut dibentuk untuk menentukan dalam kondisi seperti apa angkatan bersenjata Rusia boleh diizinkan untuk tinggal di wilayah Ukraina dan juga untuk menentukan jumlah maksimum tentara, teknik militer, dan instalasi militer yang bisa mereka miliki di sana. Rusia juga memperbaiki pembayaran tahunan terhadap kontrak sewa pangkalan militer mereka ke Ukraina. Perjanjian tersebut semulanya berlaku hingga 2017. Pada April 2010, Ukraina pada saat itu dipimpin oleh Viktor Yanukovich. Yanukovich setuju untuk memperpanjang kerjasama mereka dengan syarat yaitu bantuan ekonomi substantif yang sama dengan diskon 30% untuk gas alam Rusia, hingga 2042, dengan opsi yaitu tambahan perpanjangan lima tahun. Pada perjanjian 1997 tentang Status dan Kondisi Armada Laut Hitam di Wilayah Ukraina, Rusia memiliki hak untuk menempatkan unit militernya yang berjumlah 25.000 personel, 22 pesawat terbang, 24 kompleks artileri, dan 132 truk lapis baja di pangkalan Rusia yang terletak di Krimea dan dapat memindahkan mereka ke antar pangkalan-pangkalan lainnya dan wilayah Rusia (Bilkova, 2015).

Rusia menggunakan kekuatan militer Rusia yang berada di Krimea yang beroperasi dalam seragam pro-lokal Milisi Rusia atau dengan menggunakan seragam hijau yang mirip dengan tentara Rusia, yang biasa disebut dengan “*little green men*”. Pada Maret 2014, informasi terkait grup ini menyebar ketika mereka mulai mengambil bagian aktif dalam operasi militer, memblokir jalan, melakukan pemeriksaan keamanan dan mengambil alih Instalasi militer Ukraina dan lembaga-lembaga publik, termasuk Dewan Tertinggi Krimea. Rusia pada mulanya menolak adanya hubungan dengan “*little green men*” dan Rusia berkata bahwa mereka adalah Kelompok masyarakat setempat yang membeli seragam dan senjata mereka di sebuah toko (Shevchenko, 2014). Tetapi, Presiden Putin mengakui bahwa beberapa dari “*little green men*” itu sebenarnya adalah tentara Rusia, yang memang dikerahkan untuk mendukung pasukan pro-Rusia di Krimea. Sementara jumlah tentara yang ada di sana belum dapat dipastikan, setelah pernyataan dari Presiden Putin terhadap keterlibatan mereka dalam pengambilalihan Krimea, strategi yang mereka bentuk semakin membaik (Walker, 2014). kedua hal tersebut adalah beberapa contoh terkait tindakan ataupun kebijakan Rusia untuk mengambil alih Krimea.

Pada 17 Maret 2014, Krimea mendeklarasikan kemerdekaannya dan meminta ke Rusia untuk menjadi bagian dari pengakuan tersebut. Dewan Kota Sevastopol juga meminta izin agar pelabuhan dapat terpisah dan menjadi kota federal. Pada 18 Maret 2014, sebuah perjanjian untuk menggabungkan Krimea dan Sevastopol ditandatangani di Moskow. Hanya dalam lima hari, “*Constitutional Law on admitting to the Russian Federation the Republic of*

Crimea and establishing within the Russian Federation the New Constituent Entities the Republic of Crimea and the City of Federal Importance Sevastopol " langsung diselesaikan dengan cepat melalui Majelis Federal Rusia dan ditandatangani oleh Presiden Rusia dan sudah mulai berlaku (Bebler, 2015). Dalam kasus ini Terlihat ada beberapa kepentingan Rusia yang ingin diraih di Krimea, Beberapa orang berpendapat bahwa aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea adalah upaya untuk mengembalikan Rusia ke masa kejayaannya sebelum era Soviet dan kembali menjadi "*as one of the world's greatest civilizations.*" Meskipun begitu nasionalisme terhadap Ukraina tetap kuat, khususnya pada bagian timur Ukraina, para pejabat dan analis Ukraina melaporkan ke *Radio Free Europe / Radio Liberty* bahwa transformasi demografis yang signifikan sedang berlangsung dengan gelombang besar etnis Rusia (Popovici, 2018). Ada Pula beberapa pihak mengatakan bahwa kepentingan Rusia di Krimea karena adanya kepentingan geopolitik.

BAB III

ANALISIS IREDENTISME RUSIA TERHADAP ANEKSASI KRIMEA

Seperti yang diketahui konsep iredentisme adalah kebijakan negara yang bertujuan untuk menganeksasi wilayah yang berdampingan dan etnis yang tinggal di negara-negara tetangga. Sebagai dinamika politik, konsep tersebut terletak di persimpangan antara politik dalam negeri dan politik antar negara, dengan baik menangkap kaburnya batas-batas antara keduanya di dunia kontemporer. Pada analisis ini penulis menggunakan 2 indikator sebagai anggapan terhadap tindakan negara tersebut dapat disebut Iredentisme.

3.1 INDIKATOR TERITORIAL

Sebelum tahun 1991, tepatnya sebelum saat pembubaran USSR sebagai subjek hukum internasional, Ukraina adalah sebuah negara dan Krimea membentuk bagian integral dari wilayahnya. Dengan kata lain, bahkan sebelum disintegrasi Uni Soviet, status Krimea sebagai bagian dari wilayah Ukraina seharusnya dihormati dari perspektif hukum internasional. Di bawah Pasal 72 Konstitusi Uni Soviet tahun 1977, setiap republik Soviet memiliki hak untuk secara bebas menarik diri dari Uni Soviet. Pasal 76 Konstitusi Uni Soviet menyatakan bahwa "*the Union republic is a sovereign Soviet socialist state*". Pasal 80 Konstitusi ini mempertimbangkan hak republik Soviet untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, untuk menyimpulkan perjanjian internasional dan bertukar perwakilan diplomatik dan konsuler dengan mereka, dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi internasional (Merezhko, 2015).

Status Ukraina sebagai negara berdaulat di bawah USSR serta hak konstitusionalnya untuk menarik diri dari USSR, memiliki karakter formal, bukan karakter nyata. Namun demikian, tanpa status dan hak konstitusional ini, Ukraina tidak akan secara hukum dapat menarik diri dari Uni Soviet pada tahun 1991 dan mendapatkan kemerdekaan politik yang sebenarnya. Selain itu, harus diingat bahwa Uni Soviet diciptakan oleh perjanjian internasional (Kesepakatan Union 1922). Di bawah hukum perjanjian internasional, Ukraina memiliki hak untuk menarik diri dari perjanjian itu (Merezko, 2015).

Salah satu mitos yang dipromosikan oleh Rusia sehubungan dengan pemindahan Krimea ke Ukraina menjadi jelas oleh presiden Rusia dengan menggunakan ungkapan "*Khrushchev's gift to Ukraine*", layaknya itu adalah gerakan unilateral, seperti sebuah keinginan dari para pemimpin Soviet. Selain itu, adanya dugaan bahwa masyarakat Rusia dan Krimea tidak menyetujui transfer Krimea ke Ukraina (Popovici, 2018).

Namun, Krimea dipindahkan ke Ukraina sesuai dengan hukum konstitusi Soviet waktu itu. Pada tanggal 19 Februari 1954, Presidium Dewan Khusus Uni Soviet mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, budaya, dan geografis, serta posisi resmi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia (SFSR / RSFSR) Rusia dan Soviet Soviet Socialist Republik (SSR Ukraina) dan mengadopsi dekret tentang transfer Oblast Krimea dari SFSR Rusia ke SSR Ukraina. Pada tanggal 26 April 1954, Dewan Tertinggi Uni Soviet mengadopsi undang-undang "Tentang Pemindahan Oblast Krimea dari RSFSR ke Ukraina SSR" sesuai dengan undang-undang Soviet (Burke, 2017).

Argumen Rusia bahwa SFSR Rusia tidak memberikan persetujuannya untuk transfer Krimea terbukti salah, karena pada tanggal 2 Juli 1954, pada sesi kelima Dewan Tertinggi RSFSR, para delegasi dengan suara bulat memilih untuk membawa Konstitusi RSFSR sejalan dengan Konstitusi Uni Soviet. Akibatnya, ini berarti persetujuan Rusia untuk Krimea menjadi bagian dari Ukraina. Dengan kata lain, perubahan pasal 14 Konstitusi RSFSR dan penghapusan *Crimean oblast* memberikan bukti atas persetujuan Rusia untuk pemindahan tersebut. Di bawah hukum perjanjian internasional, persetujuan Rusia untuk mentransfer Krimea ke Ukraina dan penerimaan Ukraina dapat dianggap sebagai perjanjian internasional (Merezhko, 2015).

Status hukum Krimea sebagai bagian integral dari wilayah Ukraina kemudian diabadikan dalam Konstitusi SSR Ukraina 1978. Pasal 77 Konstitusi ini menyebutkan Krimea oblast di antara oblast lainnya dari SSR Ukraina. Sevastopol disebut sebagai "kota sub-dinasi republik" di SSR Ukraina (Merezhko, 2015).

Ketika mencoba membenarkan aneksasi Krimea, Rusia telah mengajukan berbagai macam argumen. Pertama, beberapa argumen ini disajikan dalam pidato dan wawancara dengan presiden Rusia, Vladimir Putin, kemudian argumen ini digunakan dan dijabarkan oleh pengacara internasional Rusia, yang cenderung meminta maaf daripada kritis sehubungan dengan argumentasi Putin.

Pertama, presiden Rusia tidak mengakui fakta yang jelas, diketahui oleh setiap pengacara yang mengenal hukum konstitusional Soviet: Di bawah Konstitusi Uni Soviet dan Konstitusi SSR Ukraina, Ukraina, yang secara resmi merupakan negara berdaulat juga memiliki hak berdaulat. untuk secara bebas

menarik (memisahkan diri) dari Uni Soviet, sedangkan Krimea tidak pernah memiliki hak seperti itu di bawah Konstitusi Uni Soviet atau Konstitusi SSR Ukraina. Selain itu, Ukraina memiliki hak untuk menarik diri dari Perjanjian Union tahun 1922 atas dasar Uni Soviet dibuat sesuai dengan hukum perjanjian internasional (Merezhko, 2015).

3.1.1 EURASIANISME

Rusia memiliki sejarah yang panjang mengenai kekaisaran. Pada pertengahan abad ke-16 *The Muscovite state* menjadi sebuah kerajaan, ketika Ivan IV menaklukkan Khanate di Kazan dengan penduduknya yang polyethnic dan multireligius. Pada abad ke-17, Siberia dan bagian timur Ukraina menjadi bagian dari kerajaan tersebut. Pada awal abad ke-18 Peter the Great mengumumkan bahwa Rusia sebagai Kekaisaran yang bernama *Rossiiskaia Imperiia*, yang telah menjadi nama resmi bagi negara Rusia hingga terjadinya revolusi Rusia (Kappeler, 2001). Pada akhir abad ke-19, wilayah Kekaisaran Rusia semakin membesar mulai dari Polandia di bagian Barat hingga ke perbatasan Korea di Timur, dari pantai Laut Arktik dan gurun di Asia Tengah dan hingga ke Kaukasus di Selatan. lebih dari 100 etnis minoritas Ukrainians adalah adalah kasus yang khusus (Kappeler, 2008). Mereka adalah etnis yang paling banyak setelah etnis Rusia dengan jumlah 13% dari total populasi pada awal abad ke-18 dan menjadi 18% pada akhir abad ke-19. Warga Ukraina yang disebut *Cossack Hetmanate* memiliki otonomi luas di dalam Rusia sampai tengah abad ke-18, sampai ketika itudihapuskan. Sejakakhirabadke-18, sebagian besar warga Ukrainahidupdi

negara yang didominasi oleh etnis Rusia, Kekaisaran Rusia, dan hingga kemudian menjadi Uni Soviet (Kappeler, 2014).

Pada saat 29 tahun yang lalu, Ukraina dan Rusia menjadi negara yang merdeka setelah menjadi bagian dari republik Soviet selama 70 tahun. Pemisahan Republik Soviet Sosialis Ukraina dipimpin oleh Leonid Kravchuk dan Republik Sosialis Federasi Rusia di bawah Boris Yeltsin dari Uni Soviet dan mereka beraliansi untuk melawan Presiden Soviet Gorbachev menjadi faktor penentu pembubaran negara Soviet pada Desember 1991. Hubungan antara kedua negara tersebut sejak awal sangat sulit. Hampir semua masalah berasal dari masa kekaisaran. Ada beberapa masalah yang terjadi mulai dari sekitar 8 juta etnis Rusia tinggal di Ukraina (17% dari populasinya) dan sekitar 50% warga Ukraina menggunakan Rusia sebagai bahasa pertama mereka. Keragaman regional Ukraina mencerminkan berbagai sejarah, adanya armada Laut Hitam Rusia yang terkait erat dengan pertanyaan posisi Krimea, yang telah menjadi milik Republik Soviet Sosialis Rusia sampai tahun 1954, ketika Nikita Khrushchev menetapkan bahwa Krimea harus menjadi bagian dari Ukraina, meskipun mayoritas penghuninya adalah etnis Rusia. Hal ini tidak memiliki pengaruh besar di zaman Soviet, tetapi menjadi sangat penting setelah 1991, ketika garis batas wilayah memisahkan negara-negara mereka. *The Former Autonomous Republic Soviet Crimea* pada 1992 diganti menjadi Republik Krimea dan merupakan satu-satunya wilayah otonom di Ukraina. Para pemimpin politik Republik biasanya mendukung kebijakan pro-Rusia, hingga akhirnya terjadi konflik di akhir 2013. Hubungan Rusia-Ukraina sangat sulit selama tahun pertama kemerdekaan sampai 1997,

ketika adanya perjanjian tentang persahabatan, kerja sama dan kemitraan, dan dibahas kembali selama masa presiden Viktor Yushchenko dari 2005 hingga 2010. Sejak Viktor Yanukovych terpilih sebagai presiden baru di 2010, ketegangan antar negara berkurang, walaupun tidak menghilang (Papava, 2013).

Elite Rusia dan beberapa masyarakat Rusia prihatin terkait permasalahan perbatasan Rusia yang ada dikarenakan beberapa daerah telah dihuni oleh populasi berbahasa Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet dan sudah dimiliki oleh negara lain, hal ini memberikan Rusia alasan untuk mengintervensi dalam urusan internal negara-negara tersebut (Tolz, 2001). Perlu diketahui bahwa menurut survei opini publik yang dilakukan di Rusia, adanya gagasan untuk memulihkan Uni Soviet menjadi semakin populer (Petukhov 2006).

Di sini kita melihat adanya arus kuat yaitu arus Eurasia, yang menegaskan peran sejarah dan budaya khusus untuk Rusia dalam geografi geopolitik (Kappeler, 2014),

1. Gereja Ortodoks

Bagi Kerajaan Rusia, kerja sama erat antara negara dan Gereja Ortodoks merupakan faktor penting dari klaim dan stabilitas. Rusia saat ini mengikuti kebijakan ini dan menggunakan Gereja Ortodoks sebagai instrumen politik hegemoni mereka. Di sisi lain aspirasi Gereja Ortodoks didukung oleh negara. Di Ukraina kebijakan ini difasilitasi oleh sebuah fakta bahwa mayoritas Ortodoks Ukraina mendeklarasikan diri sebagai anggota Gereja Ortodoks Ukraina yang dipimpin oleh seorang kepala dari Moskow (Vulpius, 2011).

Selama masa presiden Vladimir Putin Kerjasama antara negara dengan Gereja Ortodoks Rusia sangat diintensifkan. Bangsa Rusia diilustrasikan sebagai bangsa Ortodoks, dan Ortodoks Ukraina dianggap sebagai bagian dari komunitas tersebut. *Patriarch Kirill of Moscow* secara tegas mendukung gagasan "*Holy Russia*" dan "*the Russian world*", untuk menyatukan Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Pada musim panas 2013, di Kiev bersama dengan Presiden Rusia dan Ukraina perayaan *1025th anniversary of the baptism of Rus*’, bertujuan untuk menegaskan kepemimpinan Rusia di dunia Ortodoks "Rusia" (Kappeler, 2014).

2. Hegemoni bahasa Rusia

Masa Tsar dan Soviet, bahasa Rusia adalah bahasa yang dominan, meskipun di Uni Soviet pada saat itu, selain bahasa Rusia, terdapat bahasa Ukraina, tidak diakui secara teoritis dan posisi bahasa Ukraina ditingkatkan selama tahun 1920-an. Namun, secara prakteknya Rusia tetap menjadi bahasa yang dominan dan sejak 1930-an dan posisinya semakin diperkuat, sementara posisi bahasa Ukraina kembali melemah. Hingga hari ini bahasa Rusia tetap menjadi bahasa umum dari ruang pasca-Soviet (Kappeler, 2014).

Hingga saat ini bahasa Rusia tetap mempertahankan posisinya. Lebih darisetengah populasi Ukraina menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utamanya, meskipun banyak dari mereka yang menggunakan dua bahasa. Di Timur dan Selatan kota Ukraina, bahasa Rusia tetap menjadi bahasa yang dominan. Pemerintah Rusia sering mencela pemerintah Ukraina dengan *Ukrainization* yang kuat dari Rusia dan juga Ukraina yang berbahasa Rusia. Rusia memberikan pandangan dengan menegakkan penggunaan bahasa Ukraina di sekolah dan

institusi negara. Jadi, Rusia menggunakan dalih perlindungan pandangan minoritas linguistik menggunakan bahasa sebagai alat tekanan dan intervensi ke dalam urusan internal Ukraina (Kappeler,2014).

3. Warisan Kekaisaran Soviet

Keberadaan Republik Soviet Ukraina dan pengakuan Ukraina sebagai sebuah negara merupakan prasyarat penting bagi negara Ukraina yang merdeka, yang diciptakan pada tahun 1991. Di sisi lain, politik *Russianization* dari tahun 1930-an Pembangunan nasional Ukraina yang dilemahkan semakin lemah. Rezim Soviet membentuk mitos "persahabatan orang-orang" dan keluarga negara-negara Soviet, di mana Rusia menjadi yang lebih tua, dan orang Ukraina yang menjadi anak-anak muda. Rusia telah mendeklarasikan sebagai penerus hukum Uni Soviet. Hal ini mencakupi senjata nuklir, ambisi imperialis dan menjaga adanya wacana hegemonik (Kappeler, 2014).

Pada masa Soviet ekonomi antar negara telah terjalin erat. Ukraina dan negara republik lainnya bergantung pada pusat Soviet. Situasi tidak berubah secara fundamental setelah 1991. Rusia tetap menjadi mitra dagang utama Ukraina dan juga bergantung pada gas dan minyak Rusia. Rusia memanfaatkan ketergantungan ini sebagai instrumen politik. Rusia dan Ukraina ikut serta dalam budaya politik Soviet bersama dengan nilai-nilai umum dan tradisi ideologis. Warisan transnasional Kekaisaran Soviet tersebut belum dihancurkan seluruhnya oleh garis batas wilayah antara negara (Kappeler,2014).

3.2 INDIKATOR POLITIK DAN ETNIS

Pembahasan dari segi politik dalam dunia internasional tentunya tidak akan lepas dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, politik luar negeri Rusia sangat berfokus pada aspek militer dan keamanan internasional (Rawung, 2015). Ini sesuai dengan fenomena yang menunjukkan bahwa pergerakan dan kepentingan Rusia selama ini, salah satunya selalu berkaitan dengan pangkalan militer, khususnya kali ini dalam isu aneksasi terhadap Krimea. Disisi lain, aspek etnis juga sangat berpengaruh dalam keputusan aneksasi ini. Ada beberapa alasan, secara politik dan etnis, mengapa Rusia melakukan aneksasi pada Krimea.

Pertama, muncul dan meningkatnya gerakan separatis pro Rusia. Munculnya gerakan separatis didasarkan pada militer Rusia yang disebut *the little green man* ada di Ukraina untuk menyebarkan doktrin untuk berpihak pada Rusia. Namun fakta dimana beragamnya etnis di Krimea sejak abad 19 dan berbagai perang dan perebutan kekuasaan Krimea yang terjadi antara Ukraina dan Rusia juga menjadi faktor yang memudahkan munculnya gerakan separatis ini. Apabila ditarik sejarahnya, Etnis yang tinggal di Krimea sejak abad 19 diantaranya Cimmerian, Scythians, dan Yunani kuno, yang koloninya terletak di Laut Hitam. Pedagang Goth, Hun, Kievan Rus, Genoa dan Venesia, dan Golden Horde yang dipimpin Mongol mengendalikan berbagai bagian Semenanjung Krimea selama periode sejarah yang berbeda pada akhir milenium pertama dan awal milenium kedua (Kriim Realii, 2018).

Tabel 3 : Tabel etnis di Krimea pada 2016



Sumber : (Alpaut, 2018)

Tabel 4 : Terjemahan dari tabel 3

POPULASI NASIONAL DI KRIMEA		
RUSIA	INDONESIA	PERSENTASE
Русские (Russkiye)	Rusia	68,3%
Украинцы (Ukrainniy)	Ukraina	15,8%
Крымские татары (Kriymskiye Tatariy)	Krimea Tatars	10,6%
Татары (Tatariy)	Tatars	2,1%
белорусский (Byelorusskiy)	Belarusia	2%
Армяне (Armyanye)	Armenia	0,5%
другие национальности (Drugiye natsionalinosti)	Kebangsaan lainnya	1,7%

Meningkatnya gerakan separatis juga dipicu oleh dipilihnya Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Komunis Uni Soviet yang baru dengan kebijakannya untuk memindahkan Krimea dari Rusia ke Republik Ukraina pada tahun 1954. (Sasse, 2007) Hal ini membuktikan bahwa gerakan separatis pro Rusia semakin meningkat seiring banyaknya fenomena politik yang muncul.

Selain itu, sedikitnya pemilih Krimea untuk mendukung kemerdekaan terhadap Ukraina pada Referendum Ukraina yang dilaksanakan tanggal 1 Desember 1991 membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah gerakan separatis di Krimea. Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada rata-rata nasional 91%. Tetapi tahun-tahun pertama kemerdekaan Ukraina gerakan separatis pro-Rusia semakin populer dan meningkat. Pada kubu Rusia, yang mendukung terhadap kemerdekaan Krimea atau yang mendukung reunifikasi kawasan dengan Rusia, mendapatkan 67% suara dalam pemilihan parlemen tahun 1994. Pada saat itu Yury Meshkov yang menjadi kandidatnya, memenangkan 73% suara pada putaran kedua saat pemilihan presiden di Krimea .

Lalu, Perbedaan besar antar etnis dalam hal dukungan untuk separatisme di Krimea menjadi lebih jelas pada tahun 1990-an. Krimea merupakan satu-satunya wilayah Ukraina dengan adanya populasi mayoritas beretnis Rusia. Dilihat melalui data sensus tahun 2001 mencatat 58% populasi Krimea, termasuk Sevastopol, merupakan etnis Rusia, dan 24% sebagai etnis Ukraina dan etnis Tatar Krimea merupakan 10% dari populasi tersebut (Katchanovski, 2015).

Selain itu, terdapat kekosongan Politik di Ukraina yang memicu dibuatnya referendum yang dibuat masyarakat Krimea untuk membebaskan diri dari Ukraina

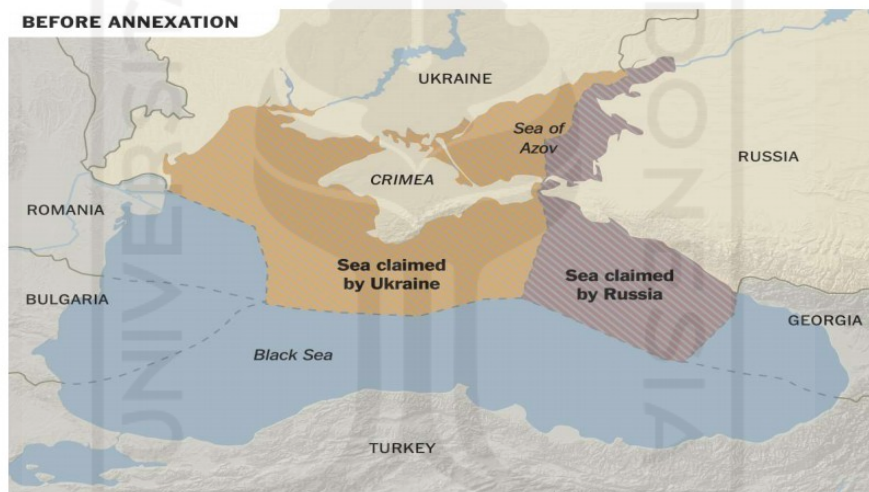
(Rawung, 2015). Hal ini merupakan fenomena politik yang menjadi salah satu alasan mengapa Rusia melakukan aneksasi terhadap Krimea. Beberapa beranggapan bahwa referendum ini dibuat karena masyarakat Krimea yang tegang akibat gejolak politik Ukraina pada saat itu memerlukan situasi tenang dan aman dari ancaman.

Dari adanya pasukan militer Rusia memperlihatkan bahwa Rusia mampu memberikan perlindungan kepada Masyarakat Krimea (Buchan, 2017). Maka dibuatkan lah Referendum yang menyatakan bahwa Kremia akan membebaskan diri dari Ukraina. Alhasil, kurang lebih 96% dari masyarakat Krimea menyetujui langkah untuk membebaskan diri dari Ukraina (Kartini, 2014). Dengan adanya referendum tersebut, secara de facto, Krimea akhirnya melepaskan diri dari Ukraina. Vladimir Putin, Presiden Rusia, dalam menanggapi hal ini langsung membuat pengakuan adanya republik krimea melalui dekrit presiden dan menyetujui masuknya krimea untuk menjadi bagian dari Rusia (Rahman, 2016).

Kedua, Aneksasi Krimea ini dapat berkontribusi dalam mengembalikan masa-masa kejayaan Rusia ketika masih menjadi Uni Soviet sebagai *the greatest civilization* dan menguasai politik internasional saat ini. Salah satu kepentingan Rusia di Ukraina khususnya di Krimea adalah untuk mendapatkan akses ke pangkalan militer yang ada di Sevastopol (Cross, 2017). Dengan adanya campur tangan Rusia di wilayah tersebut, tepatnya di laut hitam, maka Rusia akan dengan mudah membendung ancaman dari barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang berpotensi mengancam hegemoni Rusia di dunia perpolitikan internasional saat ini. Sedangkan, akan sulit untuk dioperasikan apabila Krimea masih dibawah

kekuasaan Ukraina. Perlu usaha yang lebih bagi Rusia agar bisa secara penuh mengoperasikan pangkalan militer tersebut. Karena, dalam hal ini, Ukraina menjadi entitas tertinggi yang dapat mengatur Rusia yang sudah berada di wilayah kekuasaannya dan menyewa salah satu wilayah milik Ukraina ini. Sehingga Rusia membantu Krimea dalam membebaskan diri dari Ukraina dan melakukan aneksasi terhadap daerah tersebut, agar Ukraina tidak akan lagi bisa menahan Rusia untuk menyebarkan hegemony-nya. Berikut gambar yang menunjukkan peta wilayah Krimea sebelum dan sesudah aneksasi (Broad, 2014).

Tabel 5 : Denah wilayah sebelumAneksasi



Tabel 6 : Denah wilayah sesudahAneksasi



Sumber Tabel 5 dan 6 : (Broad, 2014)

Ketiga, situasi dimana Krimea yang saat ini lebih Pro ke dunia barat (Kartini, 2014) menjadi suatu ancaman bagi Rusia sebagai negara yang ingin menyebarkan hegemony-nya. Aksi protes dan demonstrasi di Ukraina akibat penolakan pemimpin negaranya untuk dekat dengan Amerika dan Uni Eropa (Rawung, 2015) membuktikan bahwa saat ini mayoritas masyarakat Ukraina lebih berpihak pada negara barat. Pemimpin Ukraina saat ini pun telah digantikan dengan orang yang tidak berpihak pada Rusia (Rahman, 2016) karena adanya demonstrasi tersebut. Akibatnya, Rusia semakin terancam bahwa Hegemoninya akan tertahan di Ukraina yang sudah dekat dengan negara-negara barat.

Situasi dimana munculnya ancaman bagi suatu negara berpotensi menimbulkan ketegangan politik di negara tersebut. Tidak hanya pada aspek politik, melainkan berbagai aspek keamanan negara Rusia akan terkena dampaknya apabila Rusia tidak bisa mempertahankan hegemoninya di negara sekitarnya. Bahkan, apabila satu-persatu negara di sekitar Rusia Pro terhadap negara barat, maka Rusia akan semakin terancam kedudukannya karena dikelilingi oleh musuhnya sendiri. Tidak hanya memiliki banyak musuh, Rusia juga apabila Hegemoninya telah dikalahkan oleh negara barat, maka kekuatannya untuk menekan negara lain tidak akan ada lagi karena negara lain akan lebih patuh kepada negara barat dibandingkan Rusia. Lalu, dengan terancamnya Rusia di dunia internasional, maka ini akan memberi dampak pada politik domestik Rusia.

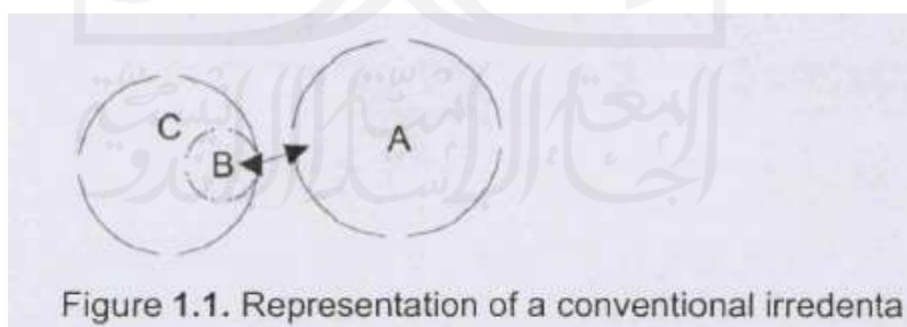
Keempat, Keinginan Rusia juga di latar belakang oleh pernah bergabungnya Krimea ke *Russian Soviet Federative Socialist Republic* (RSSR),

sehingga untuk mengembalikan masa jaya Soviet, Rusia perlu menguasai negara-negara yang telah terpecah belah. Krimea dengan bergabungnya menjadi Uni Soviet memiliki sistem yang masuk ke Rusia sehingga Rusia dengan mudah mengelola daerah tersebut khususnya pangkalan militer yang ada di Laut Hitam, Sevastopol. Akan menjadi sangat wajar, dalam segi politik, apabila akhirnya Rusia melakukan aneksasi pada Krimea.

Semenanjung Krimea secara historis dihuni oleh orang-orang yang berbeda, dan itu adalah tempat banyak perang dan konflik. Penghuni awalnya termasuk Cimmerian, Scythians, dan Yunani kuno, yang koloninya terletak di Laut Hitam. Pedagang Goth, Hun, Kievan Rus, Genoa dan Venesia, dan Golden Horde yang dipimpin Mongol mengendalikan berbagai bagian Semenanjung Krimea selama periode sejarah yang berbeda pada akhir milenium pertama dan awal milenium kedua. Krimea Khanate muncul dari Golden Horde pada abad ke-15, dan kemudian menjadi negara bawahan Turki Ottoman. Tatar Krimea sering menyerbu wilayah Ukraina, Polandia, dan Rusia sebagai bagian dari kampanye militer dan untuk menangkap sejumlah besar budak. Sebagai akibat dari perang Rusia-Turki, Krimea direbut oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1783, dan bagian penting dari populasi Tatar Krimea dimukimkan kembali atau dipaksa untuk pindah ke Kekaisaran Ottoman. Perang Krimea pada tahun 1853-1856 membawa kekalahan militer Rusia dari aliansi yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Kekaisaran Ottoman, tetapi semenanjung itu tetap berada di Kekaisaran Rusia (Magocsi, 2014).

Setelah melihat analisis dari indikator irredentisme di atas terdapat dua jenis cara untuk mengetahui konsep *irredentism*. Pertama, jika diibaratkan seperti lingkaran, terdapat tiga lingkaran, dimana lingkaran A (Rusia) merupakan negara *parent state*, dan lingkaran C (Ukraina) yang merupakan *neighbouring host state*, dan lingkaran B (Krimea) yang terletak didalam lingkaran C merupakan *transborder ethnic brethren*. Lingkaran B dan lingkaran A memiliki kesamaan etnik dan budaya, tetapi dalam situasi ini lingkaran B terdapat didalam lingkaran C, namun lingkaran A dapat memasuki lingkaran B dan sebaliknya, pergerakan inilah yang disebut *irredentism* (Fuzesi, 2014), dimana pergerakan ini bertujuan untuk menyatukan wilayah dan penduduknya seperti yang sudah dijelaskan oleh indikator teritorial dan indikator politik dan etnis yang menunjukkan bahwa Rusia membawa nilai sejarah yang terdapat di Krimea untuk menjadi dasar melakukan aneksasi ini agar nantinya Rusia dapat kembali memiliki wilayah Krimea. Yang terjadi dalam studi kasus di skripsi ini adalah *transborder ethnic brethren*.

Tabel 7 : Penjelasan konsep irredentisme pertama



Sumber : (Fuzesi, 2014)

Kedua, jika diibaratkan seperti lingkaran, terdapat empat lingkaran, dimana lingkaran A, B, C, D merupakan kelompok etnik yang tersebar di beberapa negara asalnya, dimana C dan D negara asalnya sama, karena kurangnya pengawasan dari negara asal mereka mencoba membangun wilayah sendiri dengan menyatukan etnik dari beberapa negara asal (Fuzesi, 2014). Pengertian ini dapat kita lihat melalui Konsep Eurasianisme, yang menunjukkan bahwa Krimea masih memiliki unsur-unsur peninggalan Rusia pada masa Uni Soviet, sehingga hal ini memudahkan Putin untuk menunjukkan bahwa Krimea masih berada di bawah naungan Rusia.

Tabel 8 : Penjelasan konsep irredentisme kedua

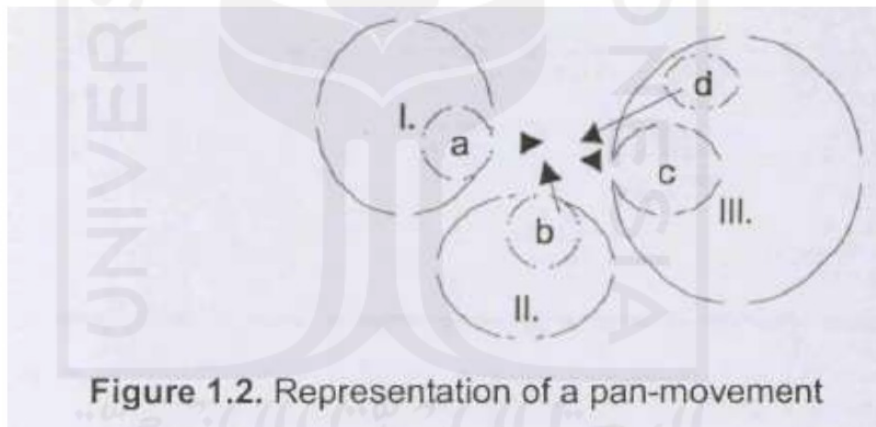


Figure 1.2. Representation of a pan-movement

Sumber : (Fuzesi, 2014)

BAB IV

KESIMPULAN

Meninjau dari analisis *Irredentism* terhadap kepentingan analisis aneksasi Rusia, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa hegemoni Rusia yang tertinggal di Krimea, seperti jika kita lihat melalui indikator teritorial Krimea tidak pernah memiliki hak seperti Ukraina yang mempunyai hak berdaulat dan juga untuk secara bebas menarik (memisahkan diri) dari Uni Soviet di bawah Konstitusi Uni Soviet atau Konstitusi SSR Ukraina, sehingga dapat dilihat ketika pemindahan tersebut ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Hegemoni Rusia lainnya yang tertinggal yaitu Gereja Ortodoks, Hegemoni bahasa Rusia, dan Warisan Kekaisaran Soviet. Beberapa hal tersebut dapat kita temukan di Krimea sehingga hal ini memudahkan Rusia untuk menunjukkan bahwa Krimea masih berada pada wilayah Rusia, dan juga peran sejarah dan budayayang ikut bermain untuk Rusia dalam geografi geopolitik. Di krimea sendiri masih banyak terdapat etnis Rusia yang tinggal di sana, sehingga memudahkan Rusia untuk menimbulkan pendukung atau separatisme agar Krimea kembali ke Rusia.

Menggunakan pengertian dari Iredentisme yang sudah dijelaskan di bagian Teori/konsep dan di bagian analisis, di mana ada dua pengertian terkait makna Irredentisme, maka melalui indikator dan pengertian tersebut konsep irredentisme memberikan petunjuk bahwa Rusia menggunakan unsur sejarah, etnis, dan politiknya untuk mengembalikan Krimea kembali pada Rusia, agar hegemoni Rusia dapat terus berjalan dan mengembalikan Krimea ke dalam naungan Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

Alpaut, Ramazan. (2018). *Detataritszatsiyya Kriima (De-Tatarization of Crimea)*. Diakses di : <https://www.idelreal.org/a/29272016.html>. Diakses tanggal : 9 Maymay 2020

Ambrosio, T. (2016). The Rhetoric of Irredentism: The Russian Federation's Perception Management Campaign and the Annexation of Crimea. *Small Wars & Insurgencies*, 468.

Bebler, Anton (2015). *Crimea and the russian-ukrainian Conflict*. pp. 15-16

Bilkova, V. (2015). The Use of Force by the Russian Federation in Crimea. Retrieved August 9, 2019, from Zaoerv: https://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_27_50.pdf

Broad, William J. (2014). In Taking Crimea, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves. Diakses di : <https://www.nytimes.com/2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-ea-of-fuel-reserves.html>. Diakses tanggal : 7 May 2020.

Buchan, R. (2017). The Crisis in Crimea and the Principle of Non-Intervention. pp. 193 - 195

Burke, J. (2017). The Reunification of Crime and The City of Sevastopol with The Russian Federation. *Russian Law*, 32-33.

Cross, S. (2017). NATO–Russia Security Challenges in the Aftermath of Ukraine Conflict. *Managing Black Sea Security and Beyond*. London: Routledge. pp.44

Czuperski, M. (2015). *Hiding in Plain Sight : Putin's War in Ukraine*. Washington DC: Atlantis Council. pp. 8

Ehrhart, H. (2014). *Russlands unkonventioneller Krieg in der Ukraine (Vol. 64)*. Wandel kollektiver Gewalt: Apuz. pp. 28

Engelberg, A. (2016). Im Fadenkreuz der Geopolitik. Die Ukraine und der neue Kalte Krieg. *Blätter für deutsche und internationale Politik*, 11, 61-170.

Forsberg, T. (2015). *Russia and NATO: From Windows of Opportunities to Closed Doors*. 41-57.

Fumagalli, M. (2010). Irredentism. Retrieved Juli 25, 2019, from Academia: [academia.edu: https://www.academia.edu/19928296/Irredentism](https://www.academia.edu/19928296/Irredentism)

Fuzesi, J. (2014). Explaining Irredentism: The Case of Hungary and its Transborder Minorities in Romania and Slovakia. *Ann Arbor: Pro Quest*. Hal. 20 dan 37 .

Kappeler, Andreas . (2014). Ukraine and Russia: Legacies of the Imperial past and Competing Memories . Hal 111- 112.

Grashkin, Andrey (2019). Russian Neo-Imperialism in Ukraine and Greece . From Foreign Policy Research Institute : <https://www.fpri.org/article/2019/07/russian-neo-imperialism-in-ukraine-and-greece/>. Accessed on February 18th, 2020.

History (2018). Crimean War. From History: <https://www.history.com/topics/british-history/crimean-war>. Accessed on February 18th, 2020.

Kartini, I (2014). Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi bagi Ukraina. Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal. 39.

Katchanovski, Ivan . (2015). Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives. Hal 82-87.

Klein, M. (2015). Wohin steuert die Ehemalige Weltmacht? Retrieved Juli 17, 2019, from Bundeszentrale für Politische Bildung: <http://www.bpb.de/izpb/209652/internationale-sicherheitspolitik?-.> pp. 48 .

Mackow, J. (2015). Die Ukraine-Krise ist eine Krise Europas. Berlin: Tapeta. hal. 11 dan 90

Magocsi, P. R. (2014) This Blessed Land: Crimea and the Crimean Tatars. Toronto: University Of Toronto Press.

McFaul, M. (2014). Faulty Powers: Who started the Ukraine crisis. Foreign Affairs, 67-171.

Merezhko, Oleksandr . (2015) . Crimea's Annexation by Russia Contradictions of the New Russian Doctrine of International Law . Hal. 169-170.

Palat, Madhavan K.. (1993). Eurasianism as an Ideology for Russia's Future. hal. 279 .

Union, Permanent Mission of the Russian Federation to the European (2016). Russian Foreign Policy. From Permanent Mission of the Russian Federation to the European Union : <https://russiaeu.ru/en/russian-foreign-policy>. Accessed on February 6th, 2020.

Putin, W. (2007). Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Retrieved Juli 17, 2019, from Kremlin: <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034>.

Putin, W. (2014). Die Krim hat eine sakrale Bedeutung für Russland. Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lage der Nation. Retrieved Juli 28, 2019, from Blätter für deutsche und internationale Politik: Available at: <https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/dokumente/%C2%BBdie-krim-hat-eine-sakrale-bedeutung-fuer-russland%C2%AB>

Putin, W. (2014). President of the Russian Federation. President of Russia. Retrieved Juli 28, 2019, from Kremlin: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603>

Popovici, A. (2018). Why Russia Wants China. From History: <https://www.history.com/news/crimea-russia-ukraine-annexation> . Accessed on August 19th 2019.

Rahman, R. H (2016). Aneksasi Krimea oleh Rusia. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. hal. 6-11

Rawung, A.K (2015). Kebijakan Ofensif Rusia terhadap Ukraina dalam melakukan aneksasi wilayah Krimea (2014). Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina Jakarta. hal. 8-79

Newspaper, Russian (2014). Resolution of the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation of March 1, 2014 N 48-SF Moscow, "On the use of the Armed Forces of the Russian Federation in Ukraine" . From Russian newspaper :<https://rg.ru/2014/03/05/voyska-dok.html>. Accessed on February 18th, 2020.

Sasse, G. (2007) The Crimea Question: Identity, Transition, and Conict. Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute. Hal. 138.

Shevchenko, Vitaly (2014). "Little green men" or "Russian invaders"? . From BBC : <https://www.bbc.com/news/world-europe-26532154>. Accessed on February 18th, 2020.

Spencer, C. 2014. Ukraine Crimea Crisis: The History. Accessed in <https://guardianlv.com/2014/03/ukraine-crimea-crisis-the-history/>. Accessed on August 19th 2019.

Treisman, D. (2016). Why Putin Took Crimea: The gambler in the kremlin. *Foreign Affairs*, 47-54.

Walker, Shaun (2015). Putin admits Russian military presence in Ukraine for first time . From *The Guardian* : <https://www.theguardian.com/world/2015/dec/17/vladimir-putin-admits-russian-military-presence-ukraine> . Accessed on February 18th, 2020.

Young, B., & Hren, D. (2017). *Introduction to Qualitative Research Methods*. Liverpool: *Mirror: Method in Research on Research*.

